

Dinamika Minoritas Muslim di Amerika Serikat¹

Oleh:
Indriana Kartini

Abstract

The September 11, 2001 attacks against the United States has become the tragedy for American society, including muslim minority in America. In the days following September 11, many people in America points a finger at a Muslim terror suspect. Muslims and people from various ethnic who appeared to be of Middle Eastern decent become the victims of discrimination and harrasment. The tragedy of September 11th, has become the turning point for Bush administration to conduct a tough policy in order to fight terrorism. President George W. Bush has dramatically overreacted to the September 11 attacks. It is bitterly ironic that it was Bush's statements condemning "secret evidence" policy and profiling that earned him the endorsement of the Muslim-American block vote in the last elections in the year 2000. However, today Bush administration expand these practices by conducting the USA PATRIOT Act with reckless abandon. The purpose of this research was to explore the problems faced by Muslim related to their position as minority in America and how they response to their problems.

Minoritas Muslim di Amerika Serikat merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Muslim di Amerika Serikat merupakan sebuah komunitas yang masih berproses menuju sebuah komunitas minoritas yang kohesif. Oleh karena itu penelitian ini berusaha menelusuri kehidupan minoritas Muslim di AS beserta problematika yang dihadapi berkaitan dengan status keminoritasannya. Sebelum membahas mengenai minoritas Muslim di AS, penting kiranya untuk memahami terlebih dahulu kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

Pada hakikatnya, minoritas merupakan sekumpulan individu yang diasingkan oleh kelompok mayoritas dalam masyarakat karena memiliki karakteristik fisik dan kultural yang berbeda. Mereka memperoleh perlakuan yang tidak sama atau sederajat yang pada akhirnya

membawa mereka pada proses pengidentifikasian diri sebagai obyek dari diskriminasi kolektif. Salah satu sifat dari diskriminasi adalah kecenderungan untuk memperlakukan orang-orang yang berbeda secara sama rata (*to treat unequally people equally*) yakni memperlakukan setiap anggota dari kelompok minoritas seolah-olah mereka sama dengan menafikan sifat individu masing-masing.²

Minoritas juga dapat didefinisikan dalam istilah keterikatan ideologis. Oleh karena itu, minoritas adalah orang-orang yang sistem pemikiran atau sistem nilainya berbeda – pada tingkatan yang lebih tinggi atau lebih rendah – dengan mayoritas di sekeliling mereka.³

Untuk dapat memahami hubungan mayoritas-minoritas maka penting kiranya untuk memahami tujuan jangka panjang (*long-run goals*) dari kelompok minoritas. Louis Wirth

¹ Tulisan ini merupakan ringkasan laporan penelitian kelompok Dunia Islam 2004, berjudul Minoritas Muslim dan Isu Terorisme di Amerika Serikat. Tim peneliti Dunia Islam beranggotakan Afadlal, Dhurorudin Mashad, Hamdan Basyar, Indriana Kartini, Riza Sihbudi, dan Sri Nuryanti.

² J. Milton Yinger, *A Minority Group in American Society*, (New York: McGraw Hill, Inc., 1965), hlm. 22, 25.

³ John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. (Terj.) (Jakarta: Mizan, 2000), hlm. 65.

membedakannya dalam empat tujuan utama, yakni asimilasi, pluralisme, secessionis, dan dominasi. Berbagai kelompok minoritas memiliki kebijakan yang berbeda-beda, namun tema utamanya adalah : menghilangkan identitas kelompok, hanya individu yang dipertimbangkan – asimilasi; mempertahankan identitas kelompok berdasarkan bahasa, agama, atau kultur dengan memegang teguh kesetiaan kepada masyarakat – pluralism; memperoleh kebebasan dengan membangun masyarakat tersendiri agar dapat mempraktekkan cara hidup sendiri tanpa adanya gangguan – secession; menghentikan dominasi kelompok lain dan melakukan berbagai cara untuk merebut status tersebut dengan cara militan jika diperlukan – dominasi. Oleh karena itu berdasarkan klasifikasi tersebut, maka kelompok minoritas di Amerika bersifat asimilasionis atau pluralistis, namun hanya gerakan Muslim kulit hitam (*Nations of Islam*) yang memperlihatkan militansi dan dominasi.⁴

Dalam rangka mewujudkan integrasi nasional, para elit pemegang otoritas politik nasional acapkali menerapkan kebijakan untuk mengasimilasi berbagai minoritas etnis agama, atas nama kesamaan dan kesatuan. Konsekuensinya, minoritas etnis dan/atau agama yang melakukan praktek-praktek religius sosial yang dianggap tidak dapat menyesuaikan diri dengan kelompok mayoritas dipaksa untuk mengorbankan identitas etnis atau agama mereka. Jika tidak, mereka akan mengalami pengasingan dan diskriminasi. Sejalan dengan hal tersebut, sistem hukum dan moral/etika yang beragam dapat mengkompromikan kesamaan antar individual atau bisa saja mengarah pada penganiayaan yang dilakukan kelompok mayoritas terhadap minoritas. Penolakan yang terjadi di negara-negara demokrasi liberal - termasuk Amerika Serikat - terhadap struktur hukum dan etika yang beragam, beranjak dari

⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

ketakutan akan hilangnya kekuatan monopolistik dan kontrol atas kelompok minoritas agama.⁵

Di sebuah negara yang memiliki karakteristik multikultural, kebijakan asimilasi dilakukan untuk mewujudkan integrasi nasional, termasuk Amerika Serikat. Sistem asimilasi yang terjadi dalam masyarakat Amerika dapat diklasifikasi dalam tiga teori utama, yaitu “Anglo-conformity”, “the melting pot”, dan “pluralisme kultural”. Teori “Anglo-conformity” pada intinya menuntut para imigran yang datang ke Amerika untuk membuang secara keseluruhan budaya leluhur mereka dan menerima perilaku dan nilai-nilai Anglo-saxon sebagai kelompok utama dalam masyarakat Amerika. Sementara itu “the melting pot” didasarkan pada penggabungan biologis antara orang-orang Anglo-Saxon dengan kelompok imigran disertai peleburan masing-masing kultur menjadi sebuah kultur Amerika yang baru. Sedangkan inti dari “pluralisme kultural” adalah pemeliharaan kehidupan komunal dan kultur yang signifikan dari kelompok imigran dalam konteks kewarganegaraan Amerika dan integrasi ekonomi dan politik ke dalam masyarakat Amerika.⁶

Pluralisme kultural sebagai salah satu sistem asimilasi berkembang menjadi perdebatan dalam diskusi demokratik di tahun 1990-an dan 2000-an seiring dengan meningkatnya arus imigrasi ke negara-negara Barat. Di Amerika Serikat sendiri, imigrasi merupakan fenomena utama semenjak “Imigrasi Besar” tahun 1890. Amerika Serikat (juga Kanada dan Australia) merupakan negara-negara yang membuka pintu bagi para imigran dengan syarat para pendatang tersebut memiliki keinginan dan kemampuan untuk berasimilasi

⁵ Ahmad Yousif, “Minorities and Religious Freedom : A Challenge to Modern Theory of Pluralism”, dalam *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 20 , No.1, 2000, hlm. 31.

⁶ Milton M. Gordon, *Assimilation in American Life, the Role of Race, Religion, and National Origin*, (New York: Oxford University Press, 1964), hlm. 85.

dengan mainstream bahasa, kultural, dan prototipe rasial di negara tersebut. Akibatnya, skala imigrasi yang meningkat di tahun 1980-an dan 1990-an kemudian mengubah kontrak Anglo-Amerika yang disepakati masyarakat mainstream selama-lamanya. Dengan adanya arus imigrasi memudahkan bagi kaum minoritas (lama maupun baru) untuk melakukan resistensi terhadap asimilasi yang diinginkan masyarakat mainstream serta menunjukkan identitas mereka secara tegas.⁷

Penelitian ini didasarkan pada studi kebijakan dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Beranjak dari kedua pedoman tersebut dikaji prinsip dan kebijakan pemerintah AS beserta realitas politik yang ditemukan dalam konteks minoritas Muslim. Di samping itu, untuk memperoleh pemahaman utuh dikaji pula hubungan horisontal antar elemen masyarakat, dalam hal ini minoritas Muslim dengan mayoritas masyarakat mainstream Amerika yang juga menjadi faktor penting dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah AS dalam konteks minoritas Muslim.

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, penelitian ini diawali dengan penelusuran data-data primer dan sekunder melalui studi literatur. Diantaranya melalui berbagai jurnal, media massa serta media internet yang memberikan informasi penting yang dapat membantu mengidentifikasi sekaligus memetakan permasalahan yang dikaji.

Minoritas Muslim di Amerika Serikat merupakan sebuah komunitas yang dinamis seiring dengan perkembangan agama Islam yang cukup pesat di negara tersebut. Hal ini terjadi karena adanya proses konversi, imigrasi, dan reproduksi dengan angka kelahiran 3,5% per tahun di atas rata-rata nasional, sehingga jumlah Muslim diperkirakan berkisar antara 5 hingga

10 juta jiwa. Sementara itu, jumlah masjid di AS berjumlah sekitar 1.209 buah. Oleh karena itu, Islam menjadi agama terbesar kedua yang dianut oleh warga AS setelah Protestan. Peluang pengembangan Islam yang cukup besar di AS didukung oleh *Declaration of Independence* dan Konstitusi AS, khususnya dalam Amandemen pertama dan ke empat belas, yang kondusif bagi pengembangan agama manapun, termasuk Islam. Dalam *Declaration of Independence* AS, bangsa Amerika bersepakat bahwa : “*all people are equal in the eyes of God and endowed by God with inalienable rights...*”

Sementara itu dalam Amandemen Pertama Konstitusi AS ditegaskan bahwa:

“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.”

Kemudian dalam Amandemen ke-14 Konstitusi AS menekankan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya, yakni : “*forbids states to deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law.*”

Seperti halnya komunitas Muslim global, komunitas Muslim di Amerika Serikat juga bersifat heterogen. Yakni, terdiri dari beragam komunitas etnis, antara lain Afrika Amerika, Asia Selatan, Arab, Afrika, Iran, Turki, Asia Tenggara, kulit putih Amerika, Eropa Timur, dan etnis lainnya. Dalam hal ini, Muslim Afrika Amerika merupakan mayoritas dengan jumlah populasi sebesar 2.100.000 jiwa atau sekitar 42 % dari total populasi Muslim di AS.⁸

Berbeda dengan minoritas Muslim di Eropa, khususnya Inggris, yang tinggal di area

⁷Robert W. Hefner (Ed.), “The Politics of Multiculturalism : Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore and Indonesia”, 2001, USA : University of Hawai’I Press, hlm. 2-3.

⁸Fareed H. Numan, The Muslim Population in The United States, “A Brief Statement”, December 1992.

ghetto (pemukiman khusus bagi imigran Muslim), minoritas Muslim di AS tinggal di berbagai area metropolitan seperti New York, Chicago, Los Angeles. Lebih luas lagi, populasi minoritas Muslim tersebar di empat wilayah utama, yakni dari New York hingga Washington; California, khususnya Los Angeles dan San Fransisco; wilayah segitiga dari Chicago ke Cleveland hingga Detroit; dan Texas khususnya Houston dan Dallas-Fort Worth. Daerah selatan dan utara AS hanya ditinggali oleh sedikit imigran Muslim, dengan pengecualian daerah selatan Florida dan Seattle. Kebanyakan wilayah utama ini memiliki konsentrasi Muslim dengan spesifikasi etnis tertentu. Di California dan Los Angeles terdapat banyak Muslim Iran. Sedangkan Texas didiami oleh banyak Muslim dari Asia Selatan. Sementara itu, wilayah segitiga didiami oleh Muslim Arab dan Afrika Amerika, kecuali Chicago yang banyak didiami Muslim dari Eropa Timur dari berbagai etnis, seperti Albania, Bosnia, dan Turki. Kota Detroit didiami oleh Muslim Arab, khususnya Libanon, Iraq, Palestina, dan Yaman.

Eksistensi Muslim Amerika dimulai pada abad ke-16 (1530), tatkala jutaan orang kulit hitam dari Afrika Barat yang beragama Islam didatangkan ke AS sebagai budak. Meski pada akhirnya kebanyakan Muslim Afrika tersebut meninggalkan identitas keislamannya akibat tekanan politis. Kemudian imigran Muslim pertama datang ke AS pada kurun abad ke-19 (1875), khususnya dari Timur Tengah, yakni dari Suriah, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Gelombang kedua, berlangsung pada abad ke-20 dan berhenti karena pecahnya perang Dunia II. Gelombang ketiga, terjadi pada pertengahan 1940-an dan 1960-an. Sementara gelombang keempat dimulai sekitar 1967.⁹

⁹ Jumlah imigran terbesar pada gelombang ketiga ialah orang-orang Palestina yang terusir dari negerinya akibat terbentuknya negara Israel, orang Mesir di masa pemerintahan Gamal Abdel Nasser, orang Irak dan Muslim dari Eropa Timur yang bermigrasi akibat tekanan penguasa komunis. Sedangkan imigran pada gelombang keempat mayoritas adalah orang terdidik dan banyak dipengaruhi oleh budaya Barat.

Sekitar abad ke-20 (1913), banyak warga Afrika Amerika berpindah agama menjadi Muslim. Kebanyakan dari mereka berpindah agama karena terpesona oleh ajaran yang dibawa oleh Noble Drew Ali (*Moorish Science Temple of America*), serta Elijah Muhammad (*Nation of Islam*) yang menggelorakan gerakan pembebasan bagi warga Afrika Amerika yang selama empat abad mengalami perlakuan diskriminatif dari mayoritas masyarakat kulit putih dan pemerintah Amerika Serikat. Organisasi Muslim Afrika Amerika yang pertama kali berhasil menarik perhatian publik Amerika adalah *Nation of Islam* (NOI). Meskipun menggunakan istilah Islam, namun pada intinya gerakan ini bersifat nasionalisme kulit hitam yang militan dan separatistis, yakni anti kulit putih dan menginginkan negara tersendiri, terpisah dari Amerika Serikat.

Organisasi NOI didirikan oleh Elijah Muhammad yang mengklaim bahwa ajarannya diperoleh dari seorang misterius Imam Mahdi Farad Muhammad dan kemudian mengangkat dirinya sebagai nabi. Ia memiliki 50.000 sampai 100.000 pengikut dan didampingi orang-orang karismatik seperti Malcolm X dan Louis Farrakhan. Elijah wafat pada 1975 dan digantikan oleh putranya Warith Deen Muhammad. Berbeda dengan ayahnya yang banyak menyimpang dari ajaran Islam sesungguhnya, Warith Deen Muhammad berusaha mentransformasikan NOI ke dalam *mainstream* Islam global (Sunni). Pada 1976, ia mendeklarasikan bahwa ayahnya bukanlah seorang nabi. Nama organisasi NOI kemudian diganti menjadi "*The American Bilalian Community*", lalu menjadi "*The World Community of Islam in the West*" dan pada tahun 1980 diganti lagi menjadi "*The American Muslim Mission*". Namun, pada tahun 1977 Louis Farrakhan menghidupkan kembali NOI yang tetap setia kepada ajaran Elijah Muhammad.

Hubungan Minoritas-Mayoritas

Meskipun eksistensi Muslim di AS telah ada selama berabad-abad lamanya, bahkan disinyalir bahwa Islam hadir sebelum kedatangan Colombus, namun hingga kini masyarakat Muslim masih belum diakui sebagai sebuah entitas minoritas yang membentuk komponen bangsa Amerika. Prinsip *melting pot* yang dianut dalam tataran pemerintah sebagai wadah pembentukan bangsa Amerika pada akhirnya menghasilkan hegemoni *Anglo-Saxon* sebagai etnisitas asli yang memonopoli ikatan primordial dalam pembentukan negara Amerika Serikat.

Meskipun dalam perkembangannya muncul pula wacana pluralisme kultural atau *salad bowl* dalam tataran masyarakat yang memberi ruang bagi eksistensi etnisitas non *Anglo-Saxon* (minoritas), namun pada kenyataannya kaum minoritas itu harus mengorbankan etnisitas aslinya dan melebur ke dalam kultur hegemon *Anglo-Saxon*. Amerikanisasi menjadi sebuah pilihan yang wajib diikuti bagi kaum minoritas jika ingin tetap eksis. Hal tersebut tentu berlaku pula terhadap masyarakat Muslim sebagai salah satu entitas minoritas di Amerika. Meskipun dalam kenyataannya, pemerintah Amerika nampak enggan memberikan label minoritas bagi masyarakat Muslim (juga minoritas lain), karena hal ini akan berakibat pada pengakuan atas hak-hak kaum minoritas yang dikhawatirkan akan meredusir hak-hak istimewa kaum mayoritas *Anglo-Saxon*. Dengan ungkapan lain, pemerintah AS memberikan kesempatan bagi Muslim untuk eksis dan berkembang dengan pengakuan hak-hak minoritas yang dibatasi.

Sementara itu, Muslim Afrika Amerika di AS merupakan elemen signifikan bagi pembentukan komunitas Muslim di Amerika. Berbeda dengan komunitas muslim lainnya, eksistensi muslim Afrika Amerika tidak bisa dilepaskan dari sejarah perbudakan di Amerika. Oleh karena itu munculnya gerakan-gerakan atau organisasi-organisasi Muslim Afrika

Amerika dipahami sebagai reaksi atas inferioritas yang dipaksakan oleh masyarakat kulit putih *Anglo-Saxon*. Ide separasi pada akhirnya muncul dan menjadi impian bagi sebagian Muslim Afrika Amerika untuk dapat hidup independen terpisah dari masyarakat hegemon kulit putih yang rasis. Namun, dalam kenyataannya ide separasi kulit hitam hanyalah sebuah utopia. Meski demikian, pemerintah dan masyarakat Amerika tidak memandang masyarakat Muslim kulit hitam sebagai sebuah entitas tersendiri, melainkan tetap menjadi bagian dari kaum minoritas kulit hitam. Bahkan, terdapat kecenderungan bahwa mereka tidak dipandang sebagai bagian dari entitas minoritas Muslim.

Problematika Minoritas Muslim

Peluang pengembangan Islam di AS memang cukup besar, namun, tantangan yang dihadapi umat Islam di AS jauh lebih besar. Tantangan yang datang dari luar ialah falsafah negara AS itu sendiri yang menganut paham sekuler yang memisahkan antara agama dengan urusan negara. Agama kemudian direduksi ke dalam lingkup 'privat' atau hanya merupakan urusan pribadi. Filosofi individualistis ini bertentangan dengan filosofi yang dianut oleh masyarakat Muslim Amerika, dan juga Muslim di seluruh dunia yang lebih berorientasi kolektif, bahwa agama bukan hanya menyangkut urusan pribadi tapi juga publik secara keseluruhan.

Inilah realita yang menghimpit umat Muslim di Amerika. Mereka harus menanggung beban sebagai kelompok masyarakat yang terus ditatap dengan penuh kecurigaan. Sehingga begitu ada pemicu, langsung berubah menjadi aksi teror yang nyata. Hal ini tentu saja terjadi karena ketidakpahaman mayoritas masyarakat non Muslim AS mengenai Islam. Dan itu terjadi karena mereka amat minim menerima informasi tentang Islam. Kalaupun ada, informasi yang diterima banyak tidak benarnya. Misalnya saja, siswa-siswa SMA di Amerika diharuskan membaca buku wajib yang di dalamnya terdapat

penjelasan tentang Islam yang ngawur dan berbahaya, seperti di bawah ini:

“Islam didirikan oleh seorang pedagang kaya berkebangsaan Arab bernama Muhammad. Dia mengaku dirinya seorang nabi, dan diikuti oleh orang-orang Arab lainnya. Kepada para pengikutnya, Muhammad menjelaskan bahwa mereka telah dipilih (oleh Tuhan) untuk memimpin dunia.”¹⁰

Selain itu, mereka cenderung memandang Islam secara monolitik dan mengabaikan perbedaan aliran yang ada dalam Islam. Bagi mereka, Islam yang dianut oleh raja-raja di negar Arab dan Ayatollah di Iran itu tidak ada bedanya, karena sama-sama menghadap Mekah ketika shalat dan keduanya menganut paham teokrasi dan negara-negara kaya minyak. Dan bagi mereka, Islam merupakan ancaman global yang potensial, sama halnya dengan komunis di era Perang Dingin.

Bagi warga Muslim Amerika yang telah berulang kali mengalami pengalaman pahit, peristiwa 11 September 2001 kemudian menjadi media klarifikasi diri bahwa Amerika adalah rumah mereka dan tempat bernaung kepentingan mereka. Peristiwa tersebut juga menyadarkan kembali rasa tanggung jawab kaum Muslim moderat untuk melawan secara aktif para ekstrimis walau hanya dalam bentuk retorika. Upaya lain yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada warga non Muslim AS mengenai Islam yang tidak mereka pahami. Selain itu, beberapa pemimpin Muslim juga berupaya untuk memberi pemahaman kepada komunitas Muslim yang selama ini terisolasi, mengenai hak dan kewajiban masyarakat sipil di AS dan untuk bersentuhan dengan kehidupan sosial di AS.

Sebenarnya, upaya untuk dapat bersentuhan dengan kehidupan bernegara di AS, terutama dalam kehidupan politik telah dilakukan oleh beberapa organisasi Islam diantaranya *the Coordinating Council of the four Muslim-*

American political organizations : CAIR, the American Muslim Alliance (AMA), *the American Muslim Council* (AMC), dan *the Muslim Political Action Committee* (MPAC). Pada Februari 1996 – atas upaya lobi organisasi Islam - untuk pertama kalinya dalam sejarah AS, Ibu Negara Amerika Hillary Rodham Clinton mengadakan jamuan makan malam untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di White House. Bagi masyarakat Muslim AS, peristiwa tersebut merupakan sebuah kemenangan publik yang signifikan.

Masyarakat Muslim AS juga berupaya memberikan kontribusi dalam pemilihan umum di AS. Misalnya saja, ketika warga Muslim/Arab Amerika memberikan bantuan dana kampanye bagi kandidat–kandidat politik seperti Wilson Grade (pemilihan walikota, 1983), Robert Neall (pemilihan anggota Kongres, 1986), Joseph Kennedy (pemilihan anggota Kongres, 1986), Walter Mondale (pemilihan presiden, 1984), dan Hillary Clinton (pemilihan anggota Kongres, 1998).

Pada pemilihan presiden tahun 2000, sekitar 70% hingga 90% masyarakat Muslim memberikan hak votingnya kepada George W. Bush. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu AS, masyarakat Muslim menggunakan hak votingnya dalam jumlah besar, yakni sekitar 34% dari total voting di AS. Masyarakat Muslim berhasil menciptakan blok suara bagi kemenangan Bush. Walaupun terdapat pengakuan simbolik dari Presiden Bush dan pejabat pemerintahan lainnya kepada komunitas Muslim, tetapi bukan berarti masyarakat Muslim AS telah diakui secara utuh. Tantangan terbesar yang masih dan akan terus dihadapi masyarakat Muslim AS adalah menjadi bagian dari institusi mainstream Amerika. Mayoritas masyarakat Muslim Amerika masih berada di luar mainstream politik AS. Seperti yang diungkapkan oleh tokoh Muslim AS, Salam Al-Marayati : “*We’re not at the table yet. We still have to earn our right to sit at the table.*”¹¹

¹⁰ Steven Barboza, *Jihad Gaya Amerika*, Bandung: Mizan, 1996, hlm. 39.

¹¹ Elise Aymer, “The American Muslim Political Renaissance”, dalam <http://www.yale.edu.com>

Muslim dan Isu Terorisme

Stereotip mengenai Islam yang radikal, ekstrim, dan teroris memang telah lama melekat dalam benak sebagian besar masyarakat Amerika. Hal ini diperkuat oleh peran media massa di AS yang seringkali menampilkan citra Islam yang negatif. Dari berbagai peristiwa kekerasan nasional di AS, Muslim senantiasa menjadi tertuduh utama. Misalnya, dalam peristiwa peledakan gedung federal di Oklahoma City, pada tahun 1995, media-media di AS menggiring opini publik bahwa peledakan tersebut dilakukan oleh teroris Islam, meski akhirnya pelaku peristiwa tersebut adalah seorang kulit putih, Timothy McVeigh.

Tatkala tragedi 9/11 terjadi, Muslim kembali harus menelan pil pahit, yakni menjadi sasaran kemarahan warga AS, mengingat pelaku penyerangan gedung WTC dan Pentagon pada 11 September 2001 disinyalir dilakukan oleh kelompok Al Qaida pimpinan Osama bin Laden yang beragama Islam. Sebagai respon atas tragedi tersebut, pemerintah AS mengeluarkan kebijakan domestik yang dirasakan merugikan warga minoritas Muslim.

Pada 26 Oktober 2001, Presiden Bush mengeluarkan kebijakan "*the USA PATRIOT Act*" (*the Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act*) yang memberi wewenang kepada lembaga eksekutif untuk menahan imigran (yang dicurigai terlibat aksi teroris) dalam jangka waktu lama bahkan tak terbatas. Pada 4 Desember 2001, pemerintah AS juga menutup lembaga-lembaga amal Muslim seperti *the Holy Land Foundation for Relief and Development* (HLF), *Global Relief Foundation* (GRF) dan *Benevolence International Foundation* (BIF) dengan tuduhan menyalurkan dana kepada kelompok HAMAS Palestina.

Pemberlakuan PATRIOT Act dengan dalih demi keamanan domestik AS pada akhirnya membawa eksese yang membahayakan

kemerdekaan dan kebebasan sipil rakyat Amerika. Sikap curiga yang ditunjukkan pemerintah AS juga berkorelasi dengan sikap sebagian masyarakat AS. Misalnya, seorang warga AS menelepon polisi untuk mengintai seorang warga berwajah Timur Tengah, yang tengah membaca artikel di surat kabar mengenai Osama bin Laden di perpustakaan umum di Florida. Laila al-Arian, staf majalah *Washington Report on Middle East Affairs*, mengungkapkan dalam sebuah pertemuan tahunan organisasi *American Muslim Alliance* pada 25 September 2004, bahwa Muslim AS merupakan target utama kebijakan PATRIOT Act. Apalagi ayahnya Prof. Sami Al-Arian juga menjadi korban dari kebijakan tersebut, di mana ayahnya ditangkap di hadapan anak-anaknya di tengah malam. Dan pemandangan ini terjadi di seluruh AS, bahkan sudah menjadi trend. Apalagi, Jaksa Agung AS, John Ashcroft dalam sebuah konferensi pers juga menuding Muslim sebagai pelaku utama setiap teror.

Kebijakan pemerintah AS untuk membatasi hak-hak sipil warga Muslim ternyata didukung pula oleh mayoritas warga AS. Berdasarkan hasil polling di AS menunjukkan bahwa 44 persen responden menginginkan adanya pembatasan dalam sejumlah hak-hak sipil warga Muslim Amerika, 48 persen responden malah menginginkan pembatasan itu dilakukan dalam semua aspek. Selain itu, 27 persen responden menyatakan setuju apabila warga Muslim diharuskan melaporkan di mana ia tinggal pada pemerintah federal. Sekitar 22 persen mendukung adanya penyelidikan tentang asal-usul warga Muslim untuk mengidentifikasi potensi ancaman serangan teroris, dan 29 persen responden berpendapat perlu adanya agen-agen yang menyamar yang masuk ke dalam komunitas Muslim, serta pembentukan organisasi-organisasi yang secara sukarela memantau aktivitas dan penggalangan dana oleh warga Muslim.¹²

¹² Lihat, <http://www.erasmuslim.com>, 30 Desember 2004.

Selain itu, pemerintah AS juga mencegah beberapa tokoh aktivis perdamaian, akademisi, bahkan penyanyi Muslim asing untuk memasuki wilayah Amerika. Pada 28 Juli 2004, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, melarang intelektual Islam terkemuka, Tariq Ramadan untuk memberi kuliah di Universitas Notre Dame. Ramadan, seorang tokoh reformis Islam Eropa, dilarang masuk ke Amerika dengan dalih demi keamanan nasional tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Tokoh Muslim lainnya yang dilarang masuk ke AS adalah seorang aktivis perdamaian asal Inggris, Yusuf Islam, yang sebelumnya terkenal sebagai penyanyi dengan nama Cat Stevens di era 70-an. Yusuf Islam dan putrinya terbang dengan menggunakan pesawat United Airlines dari London menuju Washington, DC, pada 21 September 2004. Namun, sebelum pesawat mendarat, petugas keamanan transportasi AS mencegah pendaratan pesawat tersebut dan meminta pesawat tersebut untuk mengubah arah dari Washington menuju Bangor, Maine. Yusuf Islam kemudian ditahan dan dikembalikan ke London keesokan harinya.

Tindakan pemerintah AS tersebut mengundang kecaman keras dari organisasi-organisasi Muslim di AS. Mereka beranggapan bahwa perlakuan pemerintah AS terhadap tokoh Muslim moderat seperti Yusuf Islam layaknya seorang pelaku kriminal atau teroris, tanpa adanya surat perintah penangkapan, justru membawa pesan yang salah dan mengganggu dunia Islam. Karena hal ini dapat diartikan bahwa tokoh-tokoh Muslim yang membawa pesan damai sekalipun juga dianggap membahayakan keamanan domestik AS. Direktur Eksekutif *the Council on American-Islamic Relations* (CAIR) Nihad Awad, pada 22 September 2002, menegaskan : “*It doesn't help our war on terror, It makes it harder. This is not the way to win the hearts and minds of Muslims worldwide.*”¹³

¹³ Lihat, Delinda Curtiss Hanley, “Muslim Promises a Whirlwind of Activity to Get Out the Bloc Vote on

Muslim dan Pemilihan Presiden AS

Sebagai sebuah komunitas, Muslim memiliki potensi besar untuk menjadi sebuah kekuatan sosial di AS. Aktivisme politik komunitas Muslim perlahan mulai bangkit. Berbagai organisasi Muslim yang bertujuan untuk memajukan posisi tawar Muslim dalam kehidupan politik di AS berusaha membangkitkan kesadaran politik Muslim untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum di AS. Seperti yang dilakukan oleh *The Political Action Committee of the American Moslem Political Coordination Council (AMPCC-PAC)* yang menyerukan kepada komunitas Muslim Amerika untuk memilih George W. Bush dalam pemilu presiden tahun 2000. Dalam kesempatan tersebut Muslim AS memberikan blok suara yang memuluskan jalan bagi George W. Bush menaiki kursi presiden AS.

Langkah tersebut diambil setelah AMPCC bertemu dengan George W. Bush di Detroit. Dalam pertemuan tersebut Bush berjanji akan memperhatikan kepentingan Muslim berkaitan dengan isu domestik dan luar negeri. Sementara saingan Bush dari Partai Demokrat, Al Gore justru membatalkan pertemuannya dengan pemimpin AMPCC. Meski selama kampanye pemilu presiden, peran Muslim diabaikan oleh Al Gore dan hanya memperoleh sedikit atensi dari Bush, namun pada akhirnya Muslim AS menjatuhkan pilihannya kepada Bush. Hal ini terjadi karena pernyataan Bush dalam debat capres yang menentang kebijakan “*secret evidence*” di mana Muslim menjadi target utama dari kebijakan tersebut.¹⁴ Hasilnya mengejutkan, sekitar 2,3 juta atau 72% dari total

Election Day”, *the Washington Report on Middle East Affairs*, November 2004, hlm. 32.

¹⁴Bagi Muslim AS, kebijakan *secret evidence* merupakan isu utama, sehingga pernyataan Bush tersebut dianggap sebagai janji untuk melakukan tindakan korektif jika Bush terpilih menjadi presiden AS. Dan, pernyataan Bush tersebut cukup memotivasi warga Muslim untuk datang ke tempat-tempat pemungutan suara dan memberikan suara mereka bagi Gubernur Texas tersebut.

suara Muslim Amerika diberikan kepada George W. Bush. Oleh karena itu, dapat diungkapkan bahwa blok suara Muslim merupakan kunci bagi kemenangan Bush.

Namun, ironisnya, pasca peristiwa 11 September 2001, kebijakan *secret evidence* yang sebelumnya dikecam oleh Bush justru dipraktekkan secara intensif di masa pemerintahan Bush. Bush kemudian memperluas penggunaan *secret evidence* dengan mengeluarkan kebijakan PATRIOT Act, karena menurut Bush, kebijakan *secret evidence* kurang efektif dalam hal perang melawan terorisme.

Oleh karena itulah, pada saat menjelang pemilihan presiden AS tahun 2004, perdebatan di kalangan Muslim berkisar pada siapa kandidat presiden yang akan dipilih oleh Muslim Amerika. Dan, apakah akan ada blok suara Muslim seperti halnya terjadi dalam pemilihan presiden tahun 2000, di mana suara Muslim diberikan kepada George W. Bush. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bahan diskusi dalam konvensi ke-41 *Islamic Society of North America* (ISNA) yang diselenggarakan pada Hari Buruh di Chicago, Illinois. Permasalahan tersebut menjadi perdebatan hangat dalam diskusi yang diselenggarakan oleh *the American Muslim Taskforce on Civil Rights and Elections* (AMT). AMT merupakan organisasi yang memayungi beberapa organisasi Muslim seperti *the American Alliance* (AMA), *Council on American-Islamic Relations* (CAIR), *Islamic Society of North America* (ISNA), *Muslim Alliance of North America* (MANA), *Muslim American Society* (MAS), *Muslim Public Affairs Council* (MPAC), *Muslim Student Association-National* (MSA-N), *Project Islamic Hope* (PIH), dan *United Muslims of America* (UMA).

Tujuan dari AMT antara lain: 1) mengupayakan hak-hak sipil dan hak asasi manusia menjadi agenda utama setiap presiden AS; 2) membangun koalisi hak-hak sipil nasional yang bertahan untuk jangka waktu yang lama;

3) memberi tekanan kepada kandidat presiden, khususnya dari partai Demokrat untuk mendukung pengakuan hak-hak sipil bagi seluruh warga AS; 4) memobilisasi blok suara yang lebih luas, terdiri dari Muslim, Kristen Arab, serta para pendukung Partai Hijau, Libertarian, Independen, dan lainnya dalam rangka memberikan dukungan kepada kandidat yang pro hak-hak sipil.¹⁵

Jika dalam pemilihan presiden sebelumnya, partai Republik dan Demokrat hanya memberi sedikit atensi terhadap komunitas Muslim yang kuat di AS, maka dalam pemilihan presiden tahun 2004, kedua partai tersebut berupaya untuk merebut suara Muslim bagi kemenangan kandidat masing-masing. Apalagi, komunitas Muslim dan Arab banyak yang bermukim di wilayah-wilayah perebutan suara seperti di negara bagian Florida, Ohio, Michigan, dan Pennsylvania. Ditambah lagi dengan munculnya inisiatif dari AMT untuk membentuk koalisi hak-hak sipil nasional yang dapat menghasilkan blok suara pendukung hak-hak sipil dari sekitar 10 juta pemilih Muslim. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, partai-partai besar di Amerika seperti Republik dan Demokrat berupaya menarik simpati para pemilih Muslim. Misalnya saja, dalam konvensi ke-41 ISNA, masing-masing partai membangun stand yang diberi nama "Muslims for Bush" dan "Muslims for Kerry". Selain itu, ada pula sejumlah Muslim yang menjadi pendukung kandidat Independen, Ralph Nader.

Berdasarkan hasil polling dari Zogby International, diperoleh angka sekitar 76 atau 77 persen Muslim Amerika memberikan dukungannya kepada kandidat Demokrat, John Kerry.¹⁶ Namun demikian, di dalam komunitas

¹⁵Lihat, Lisette Poole, "American Muslims Strategize Presidential Endorsement", *the Washington Report on Middle East Affairs*, November 2004.

¹⁶Lihat, Delinda Curtiss Hanley, "Muslim Promises ...", *the Washington Report on Middle East Affairs*, November 2004, hlm. 32.

Muslim sendiri masih timbul perdebatan internal mengenai kandidat mana yang layak didukung oleh Muslim. Hal ini disebabkan kandidat Demokrat John Kerry kurang memiliki ketegasan sikap dalam hal pengakuan hak-hak sipil yang merupakan agenda perjuangan komunitas Muslim Amerika. Mengenai kebijakan PATRIOT Act yang ditentang oleh komunitas Muslim, John Kerry tetap mendukung pemberlakuan kebijakan tersebut meski menjanjikan akan melakukan modifikasi atas beberapa ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa alternatif yang diajukan Kerry tidak jauh berbeda dari kandidat partai Republik.

Namun demikian, tampaknya komunitas Muslim pada akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada kandidat Demokrat, John Kerry. Hasil survei lain yang dilakukan organisasi muslim Amerika yang besar, *Council on American-Islamic Relations* (CAIR), juga menunjukkan mayoritas komunitas Muslim mendukung John Kerry dalam pemilihan Presiden tahun 2004. Survei tersebut dilakukan dengan mengirim daftar pertanyaan kepada pelanggan e-mail mereka. Dari semua responden, 54 persen mengatakan mereka akan memilih Kerry dalam pemilihan presiden. Sekitar 26 persen mengatakan mereka akan memilih calon independen Ralph Nader, seorang keturunan Libanon. Hanya 2 persen yang menyatakan akan memberi suara kepada Presiden Bush. Hampir separuh responden mengatakan bahwa mereka telah mengalami suatu bentuk diskriminasi sejak terjadinya tragedi 9/11.¹⁷

Penutup

Minoritas Muslim di Amerika merupakan sebuah komunitas yang dinamis. Sebagai sebuah komunitas, Muslim Amerika merupakan sebuah mosaik yang terdiri dari beragam etnis.

Perkembangan Islam yang pesat di Amerika menjadi menjadikan komunitas Muslim di Amerika sebagai sebuah kekuatan sosial yang potensial. Namun demikian, kurangnya pemahaman antar komunitas muslim, masih menjadi kendala internal yang menghambat kesatuan umat Islam di Amerika. Oleh karena itu, langkah menuju bersatunya komunitas Muslim tersebut sangat penting dilakukan demi memperkuat kohesivitas minoritas Muslim sebagai sebuah kekuatan sosial maupun kekuatan politik di Amerika.

Sementara itu, hubungan antara minoritas Muslim dengan mayoritas masih diwarnai oleh kurang pahamiannya masyarakat Amerika mengenai Islam. Stereotip mengenai Islam yang seringkali dikaitkan dengan terorisme masih diyakini oleh sebagian masyarakat Amerika. Hal ini tercermin dengan dukungan sebagian besar masyarakat Amerika terhadap kebijakan pemerintah AS yang membatasi hak-hak sipil minoritas Muslim. Oleh karena itu, agenda utama minoritas Muslim adalah memperjuangkan pengakuan hak-hak sipil dan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat Amerika tanpa kecuali. Hal ini penting mengingat komunitas Muslim telah lama mengalami perlakuan diskriminatif, khususnya pasca terjadinya tragedi 9/11.

Berdasarkan pertimbangan itulah, mayoritas Muslim mendukung kandidat presiden dari Partai Demokrat, John Kerry dalam pemilihan Presiden yang dilaksanakan pada 2 November 2004. Kebijakan domestik pemerintahan Bush, khususnya pemberlakuan PATRIOT Act, dirasakan merugikan komunitas Muslim, sehingga dukungan Muslim bagi Bush dalam pemilihan presiden tahun 2000 kini dialihkan kepada Kerry. Namun, hasil pemilihan presiden Amerika Serikat menunjukkan kemenangan di pihak George W. Bush. Oleh karena itu, tampaknya perjuangan Muslim untuk memperoleh kesetaraan hak-hak sipil, tampaknya masih panjang dan berliku.

¹⁷ <http://www.voanews.com/indonesian/Archive/a-2004-07-01-3-1.cfm>, 1 Juli 2004.

Daftar Pustaka

- Aymer, Elise, "The American Muslim Political Renaissance", dalam <http://www.yale.edu.com>.
- Barboza, Steven. *Jihad Gaya Amerika*. Bandung: Mizan, 1996.
- Esposito, John L. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. (terj.) Jakarta: Mizan, 2000.
- Gordon, Milton M. *Assimilation in American Life, the Role of Race, Religion, and National Origin*. New York : Oxford University Press, 1964.
- Hefner, Robert W. (Ed.), *The Politics of Multiculturalism : Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore and Indonesia, USA* : University of Hawai'I Press, 2001.
- Hanley, Delinda Curtiss "Muslim Promises a Whirlwind of Activity to Get Out the Bloc Vote on Election Day", dalam *the Washington Report on Middle East Affairs*, November 2004.
- Numan, Fareed H. *The Muslim Population in The United States, A Brief Statement*, December 1992.
- Yinger, J. Milton. *A Minority Group in American Society*. New York: McGraw Hill, Inc., 1965.
- Yousif, Ahmad. "Minorities and Religious Freedom : A Challenge to Modern Theory of Pluralism", dalam *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 20, No.1, 2000.
- <http://www.eramuslim.com>, 30 Desember 2004.
- <http://www.voanews.com/indonesian/Archive/a-2004-07-01-3-1.cfm>, 1 Juli 2004.